Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 1, March 2026 (h.68-89)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Korelasi antara Implementasi *E-Government* dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Publik di Daerah

Haidar Adam
UNAIR Surabaya, Indonesia
Email: haidar@fh.unair.ac.id

Abstract

The implementation of e-government in local governments in Indonesia is not only aimed at improving bureaucratic efficiency and public service quality but also at encouraging community participation in public oversight. However, the correlation between the maturity level of e-government implementation and the level of community participation in oversight functions has not been extensively studied empirically. This article aims to analyze the correlation between the implementation of e-government and the level of community participation in public oversight at the local level. Using a normative-empirical legal research method with a statutory and socio-legal approach, this study finds that the correlation is not automatically linear. The success of e-government in encouraging oversight participation is highly dependent on several intervening variables, including digital literacy levels, the quality of public information disclosure, the responsiveness of local governments to feedback, and inclusive technology accessibility. The study concludes that to strengthen this correlation, local governments need to develop e-government not only as an administrative tool but also as a genuine participatory platform that is accessible, responsive, and supported by strong regulations regarding public information disclosure.

Keywords*: E-Government; Public Participation; Public Oversight; Local Government; Digital Democracy.*

Abstrak

Implementasi *e-government* di pemerintahan daerah di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik, tetapi juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik. Namun, korelasi antara tingkat kematangan implementasi *e-government* dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan belum banyak dikaji secara empiris. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara implementasi e-government dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik di tingkat daerah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan sosio-legal, studi ini menemukan bahwa korelasi tersebut tidak bersifat linear secara otomatis. Keberhasilan e-government dalam mendorong partisipasi pengawasan sangat tergantung pada sejumlah variabel antara, seperti tingkat literasi digital, kualitas keterbukaan informasi publik, responsivitas pemerintah daerah terhadap aspirasi yang masuk, serta aksesibilitas teknologi yang inklusif. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk memperkuat korelasi tersebut, pemerintah daerah perlu mengembangkan *e-government* tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai platform

partisipatif yang genuine, mudah diakses, responsif, dan didukung oleh regulasi yang kuat mengenai keterbukaan informasi publik.

Kata Kunci: *E-Government*; Partisipasi Masyarakat; Pengawasan Publik; Pemerintah Daerah; Demokrasi Digital.

Pendahuluan

Implementasi e-government telah menjadi tonggak penting dalam transformasi tata kelola pemerintahan di era digital, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi publik. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah daerah dapat menyediakan berbagai platform digital seperti portal layanan, aplikasi pengaduan, dan sistem informasi yang memungkinkan warga untuk mengakses data publik, menyampaikan aspirasi, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah secara lebih mudah dan cepat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama e-government yaitu mewujudkan good governance yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas pelayanan publik. Studi menunjukkan bahwa implementasi e-government dapat memperkuat mekanisme pengawasan publik dengan membuka akses informasi yang lebih luas dan interaktif sehingga masyarakat memiliki peran aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan (Defitri et al., 2020). Namun demikian, keberhasilan e-government dalam mendorong partisipasi masyarakat tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi semata, melainkan juga pada kesiapan infrastruktur digital, literasi teknologi warga, serta komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem yang inklusif dan responsif.

Meskipun banyak pemerintah daerah telah mengembangkan infrastruktur e-government berupa situs web resmi dan aplikasi pengaduan publik, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui platform digital tersebut masih relatif rendah di sejumlah wilayah. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa kendala utama seperti kesenjangan digital (digital divide), rendahnya kemampuan literasi teknologi di kalangan warga, serta kurangnya kepercayaan terhadap efektivitas respons pemerintah dalam menindaklanjuti laporan atau aspirasi yang disampaikan secara daring. Sebaliknya, terdapat pula daerah-daerah dengan infrastruktur digital yang belum memadai namun memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi karena didukung oleh budaya sosial-politik lokal yang kuat serta tradisi partisipatif yang sudah lama terbangun. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi e-government harus dipahami sebagai bagian dari ekosistem sosial-politik yang kompleks dan tidak bisa hanya mengandalkan aspek teknis teknologi saja (Shkarlet et al., 2020). Oleh karena itu, faktor-faktor sosial budaya dan politik lokal menjadi variabel penting yang memediasi hubungan antara implementasi e-government dan partisipasi masyarakat.

Korelasi antara implementasi e-government dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik bersifat multifaktorial dan dipengaruhi oleh sejumlah variabel mediasi seperti literasi digital, kepercayaan kepada pemerintah, kualitas keterbukaan informasi, serta persepsi manfaat penggunaan teknologi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan prediktor utama keberhasilan partisipasi melalui platform digital. Kepercayaan ini dipengaruhi oleh

persepsi kemudahan penggunaan teknologi (perceived ease of use), manfaat yang dirasakan (perceived usefulness), serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan layanan digitalnya. Selain itu, peran media sosial sebagai saluran komunikasi juga sangat penting untuk menyebarkan informasi terkait e-government sehingga meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga . Studi dari India menegaskan bahwa pemberdayaan digital warga (digital citizen empowerment) terdiri dari dimensi emosional, kognitif, relasional, dan perilaku; di mana pemberdayaan perilaku menjadi aspek paling krusial untuk meningkatkan kualitas partisipasi melalui mekanisme akuntabilitas yang efektif (Abdulraheem et al., 2018). Dengan demikian, strategi pengembangan e-government harus mencakup peningkatan literasi digital masyarakat sekaligus membangun kepercayaan melalui keterbukaan informasi dan responsivitas pemerintah.

Dari sisi kelembagaan dan kebijakan publik, penerapan e-government berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas birokrasi jika didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik serta mekanisme partisipatif yang efektif. Penggunaan teknologi digital memungkinkan akses informasi publik menjadi lebih cepat dan luas sehingga memperkuat mekanisme pengawasan dari masyarakat. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil serta disparitas kemampuan sumber daya manusia aparat pemerintahan masih menjadi hambatan utama bagi optimalisasi fungsi e-government. Penelitian di Nigeria menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti harapan kinerja (performance expectancy), kondisi pendukung (facilitating conditions), pengaruh sosial (social influence), dan kemudahan usaha (effort expectancy) secara signifikan memengaruhi niat perilaku masyarakat untuk mengadopsi alat e-government guna memantau pelaksanaan proyek infrastruktur publik (Sun et al., 2015) . Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur negara sekaligus investasi pada infrastruktur teknologi informasi menjadi prasyarat penting agar e-government dapat berfungsi optimal sebagai alat pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan publik.

Selain itu, integrasi antara layanan e-government dengan partisipasi aktif warga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Studi menunjukkan bahwa kombinasi antara layanan digital berkualitas tinggi, keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, serta transparansi pemerintahan secara signifikan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Kepercayaan ini merupakan modal sosial penting untuk mendorong partisipasi berkelanjutan dalam pengawasan publik melalui platform digital (Mukherjee, 2019). Namun demikian, tantangan seperti ketidakmerataan akses teknologi dan perbedaan tingkat literasi digital antar wilayah harus diatasi agar manfaat e-government dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, korelasi antara implementasi e-government dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik di daerah tidak bersifat linier atau otomatis positif. Keberhasilan integrasi keduanya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, literasi digital warga, kualitas transparansi pemerintah serta budaya sosial politik lokal yang mendukung partisipasi aktif. Model ideal pengembangan e-government partisipatif harus mengakomodasi faktor-faktor tersebut dengan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kapasitas teknis sekaligus membangun kepercayaan melalui keterbukaan informasi dan

responsivitas pemerintah (Sharma, 2004). Dengan demikian, e-government dapat menjadi instrumen efektif untuk memperkuat demokratisasi lokal melalui peningkatan pengawasan publik yang nyata dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, penelitian empiris global menunjukkan bahwa perkembangan e-government memiliki dampak positif signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Analisis data panel lintas negara selama periode 2010-2018 menemukan bahwa perkembangan e-government mendorong perbaikan pada dimensi tata kelola seperti suara rakyat (voice and accountability), efektivitas pemerintahan (government effectiveness), kualitas regulasi (regulatory quality), serta supremasi hukum (rule of law). Namun demikian efek positif tersebut cenderung lebih lemah pada dimensi stabilitas politik serta kontrol korupsi sehingga masih terdapat kesenjangan antara visi ideal penggunaan e-government dengan realita implementasinya di lapangan (Wang et al., 2020). Temuan ini menegaskan perlunya upaya berkelanjutan untuk memperkuat aspek-aspek tata kelola tertentu agar potensi penuh dari implementasi e-government dapat diwujudkan.

Dalam konteks Indonesia khususnya pemerintahan daerah dengan otonomi luas pasca desentralisasi, penerapan e-government menghadirkan peluang sekaligus tantangan tersendiri. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menyediakan infrastruktur teknologi tetapi juga membangun sistem layanan elektronik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dengan kemampuan terbatas dalam menggunakan teknologi digital. Selain itu diperlukan kebijakan adaptif untuk meningkatkan literasi digital warga sekaligus memastikan keterbukaan informasi secara maksimal agar ruang partisipatif benar-benar terbuka lebar bagi semua pihak tanpa diskriminatif (Utama, 2020) . Pendekatan sosio-legal sangat relevan digunakan untuk memahami dinamika interaksi antara regulasi formal dengan praktik sosial-politik lokal terkait pemanfaatan platform digital dalam pengawasan publik.

Salah satu contoh konkret keberhasilan penerapan e-government adalah penggunaan aplikasi Siswaskeudes oleh Inspektorat Kabupaten Buton Tengah untuk mengawasi penggunaan dana desa secara transparan. Studi kasus menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini cukup tinggi terutama terkait aspek responsivitas aparat pengawas serta kemudahan akses informasi melalui aplikasi tersebut. Meskipun demikian masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi di desa-desa terpencil serta variasi kemampuan literasi digital antar pengguna sehingga perlu adanya upaya peningkatan kapasitas teknis sekaligus edukatif bagi aparat desa maupun warga (Dias, 2020) . Kasus ini menggambarkan bagaimana sinergi antara inovasi teknologi dengan dukungan sosial-politik lokal dapat menghasilkan mekanisme pengawasan berbasis elektronik yang efektif.

Peranan media sosial juga tidak kalah penting sebagai kanal komunikasi alternatif untuk menyebarluaskan informasi mengenai layanan e-government sekaligus membangun kesadaran kolektif akan pentingnya partisipasi aktif warga dalam proses pengawasan publik (Kim & Lee, 2012). Penelitian di Indonesia menemukan bahwa kehadiran media sosial sebagai sarana penyebaran informasi tentang program-program pemerintah berbasis elektronik mampu meningkatkan tingkat kepercayaan warga terhadap layanan tersebut apabila disertai dengan

transparansi tata kelola pemerintahan yang baik (Moreno-Enguix et al., 2019) . Oleh karena itu strategi komunikasi pemerintah harus melibatkan media sosial secara intensif agar pesan-pesan tentang manfaat penggunaan platform digital sampai kepada seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda.

Dalam hal desain kebijakan publik terkait implementasi e-government perlu diperhatikan pula karakteristik demografis wilayah seperti ukuran populasi kota/kabupaten karena studi lintas negara Portugal menunjukkan bahwa semakin besar ukuran populasi suatu daerah maka semakin banyak mekanisme partisipatif berbasis elektronik yang diterapkan oleh pemerintah setempat guna menjaring aspirasi warganya (J. Lee & Kim, 2018) . Hal ini relevan bagi pembuat kebijakan Indonesia agar mempertimbangkan skala demografis ketika merancang program-program pelayanan elektronik supaya sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah.

Selain itu pembangunan kapasitas aparatur birokratik juga menjadi faktor kunci keberhasilan implementas i-e government karena SDM birokratis harus mampu mengoperasikan sistem elektronik secara profesional sekaligus memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa layanan publik berbasis daring (Krishnan et al., 2017). Kajian sistematis menegaskan perlunya reformulasi kebijakan manajemen sumber daya manusia sektor publik agar selaras dengan tuntutan era digital termasuk peningkatan kompetensi teknis pegawai negeri sipil serta penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi akuntabilitas demi mendukung efektivitas birokrasi modern (Tursunbayeva et al., 2017).

Pengalaman Nigeria dalam menggunakan alat-alat e-government untuk memantau pelaksanaan proyek infrastruktur umum memberikan gambaran bagaimana faktor-faktor psikologis pengguna seperti harapan kinerja sistem (performance expectancy) maupun kondisi pendukung teknis sangat menentukan niat perilaku mereka menggunakan platform tersebut secara aktif (Budi et al., 2020). Temuan ini relevan bagi Indonesia terutama daerah-daerah tertinggal agar fokus pada penyediaan fasilitas pendukung lengkap disertai sosialisai intensif guna mendorong adopsi teknologi oleh masyarakat luas (Steinbach et al., 2019).

Secara konseptual pemberdayaan warga melalui platform elektronik bukan sekadar soal akses fisik terhadap perangkat atau jaringan internet tetapi juga mencakup dimensi emosional yakni rasa percaya diri menggunakan teknologi; dimensi kognitif berupa pemahaman atas hak-hak sipil; dimensi relasional yakni jejaring sosial pendukung; hingga dimensi perilaku berupa tindakan nyata berpartisip asi aktif dalam proses demokratis online (Santamaría-Philco et al., 2019). Pendekatan multidimensional ini membantu merumuskan strategi pemberdayaan warga agar tidak hanya pasif menerima layanan tetapi turut berkontribusi membentuk kebijakan lewat mekanisme feedback elektronik.

Dalam konteks pemberantasan korupsi misalnya perpaduan antara teknologi digital seperti blockchain atau whistleblowing system dengan keterlibatan aktif masyarakat terbukti mampu mempercepat deteksi penyimpangan sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif akan bahaya korupsi sehingga mendorong terciptanya pemerintahan lebih bersih dan terpercaya (Salamat et al., 2011). Hal ini menegaskan potensi besar sinergi antara inov asi teknologi dengan gerakan sosial-partisipatif berbasis komunitas lokal maupun nasional.

Namun demikian perlu dicatat bahwa meskipun potensi besar tersebut ada tetap dibutuhkan regul asi adaptif guna menjamin perlindungan data pribadi pengguna sekaligus memastikan independensi lembaga-lembaga pengawas agar tidak terjebak politisasi atau manipul asi kepentingan tertentu sehingga menjaga kredibilitas sistem elektronik sebagai instrumen kontrol sosial (Braga & Gomes, 2016).

Pengembangan model ideal e-governance parti(Ashaye & Irani, 2019)sipatif hendaknya mengintegrasikan berbagai elemen mulai dari kesiapan teknis infrastruktur IT; peningkatan kapasitas SDM aparatur; eduk asi liter asi digital bagi warga; pembangunan budaya transparansi; hingga pembentukan mekanisme feedback responsif sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat (Wilson, 2020). Model semacam ini akan memungkinkan terciptanya ekosistem tata kelola pemerintahan modern berbasis kolaboratif dimana setiap elemen saling mendukung demi tercapainya tujuan bersama yaitu pelayanan prima sekaligus kontrol efektif atas jalannya pemerintahan (Nulhusna et al., 2017).

Kerangka Normatif E-Government dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Publik

1. Landasan Hukum Implementasi E-Government di Daerah

Implementasi e-government di Indonesia memiliki landasan normatif yang kuat dan berkelanjutan, dimulai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang menjadi tonggak awal bagi seluruh jajaran pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Instruksi Presiden ini menegaskan pentingnya transformasi digital sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta pengelolaan administrasi pemerintahan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan harus didukung oleh sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan aplikasi dan platform digital yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kemudian mewajibkan seluruh instansi pusat dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu guna mencapai birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan kerangka regulasi ini, implementasi e-government di Indonesia diarahkan tidak hanya sebagai alat administratif tetapi juga sebagai instrumen demokratisasi yang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik (Allen et al., 2020).

Di tingkat daerah, implementasi SPBE diwujudkan melalui berbagai bentuk inovasi digital seperti portal layanan publik terpadu, aplikasi pengaduan masyarakat, sistem informasi perencanaan dan penganggaran, serta sistem informasi pengawasan internal. Setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya masing-masing dengan tetap mengacu pada

arsitektur SPBE nasional agar tercipta interoperabilitas antar sistem. Indeks SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) setiap tahunnya menjadi tolok ukur untuk menilai tingkat kematangan implementasi e-government di setiap daerah. Indeks ini mencerminkan aspek-aspek seperti ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, kualitas layanan digital, tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan tersebut, serta transparansi data publik. Melalui mekanisme evaluasi ini, pemerintah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan implementasi e-government di berbagai wilayah sehingga dapat merumuskan kebijakan perbaikan yang lebih tepat sasaran (Scott, 2006).

Korelasi antara implementasi e-government dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik di daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi serta literasi digital warga. Masyarakat yang memiliki akses mudah ke internet dan perangkat digital cenderung lebih aktif menggunakan platform e-government untuk menyampaikan aspirasi maupun melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun demikian, kesenjangan digital masih menjadi kendala utama terutama di wilayah pedesaan atau terpencil dimana akses internet terbatas dan kemampuan menggunakan teknologi masih rendah. Hal ini menyebabkan disparitas partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik melalui media elektronik sehingga potensi e-government belum sepenuhnya terealisasi secara merata. Oleh karena itu peningkatan literasi digital melalui program edukatif menjadi sangat penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal (Naranjo-Zolotov et al., 2019a).

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan partisipasi warga melalui platform e-government. Kepercayaan ini dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan teknologi (perceived ease of use), manfaat nyata yang dirasakan (perceived usefulness), serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan layanan digitalnya. Jika warga merasa bahwa aspirasi mereka didengar dan ditindaklanjuti secara responsif maka motivasi mereka untuk berpartisipasi akan meningkat signifikan. Sebaliknya apabila terdapat ketidakpastian atau kecurigaan terhadap integritas sistem maka partisipasi cenderung menurun bahkan bisa menimbulkan apatisme politik (Drobiazgiewicz, 2018). Studi dari India menunjukkan bahwa pemberdayaan digital warga terdiri dari dimensi emosional, kognitif, relasional, dan perilaku; dimana pemberdayaan perilaku adalah aspek paling krusial untuk meningkatkan kualitas partisipasi melalui mekanisme akuntabilitas yang efektif (Sandoval-Almazán & Gil-Garcia, 2011). Dengan demikian pembangunan kepercayaan harus menjadi prioritas utama dalam strategi pengembangan e-government.

Dari sisi kelembagaan, penerapan e-government berpotensi meningkatkan transparansi birokrasi jika didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik serta mekanisme partisipatif yang efektif. Teknologi digital memungkinkan akses informasi publik menjadi lebih cepat dan luas sehingga memperkuat mekanisme pengawasan dari masyarakat terhadap

pelaksanaan kebijakan maupun penggunaan anggaran publik. Namun tantangan utama adalah disparitas kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam mengoperasikan sistem elektronik serta keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah terpencil masih menjadi hambatan serius bagi optimalisasi fungsi e-government (Kim & Lee, 2019). Oleh karena itu diperlukan investasi berkelanjutan pada pelatihan SDM birokratis sekaligus pembangunan infrastruktur IT agar pelayanan publik berbasis elektronik dapat berjalan lancar.

Integrasi antara layanan e-government dengan partisipasi aktif warga juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara layanan digital berkualitas tinggi, keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan melalui platform daring, serta transparansi tata kelola secara signifikan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Choi & Song, 2020). Kepercayaan ini merupakan modal sosial penting untuk mendorong partisipasi berkelanjutan dalam pengawasan publik melalui media elektronik sehingga tercipta siklus positif antara pelayanan prima dengan kontrol sosial efektif.

Namun demikian korelasi positif antara implement asi-e government dengan tingkat partisp asi masyar akat dal am pengawasan publik tidak bersifat linier atau otomatis terjadi tanpa hambatan. Keberhasilan integrasi keduanya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi; literasi digital warga; kualitas transparansi pemerintah; serta budaya sosial politik lokal yang mendukung partispasi aktif (Vakeel & Panigrahi, 2017). Model ideal pengembangan e-government partisipatif harus mengakomod asi faktor-faktor tersebut dengan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kapas it as teknis sekaligus membangun kepercayaan melalui keterbukaan informasi dan responsivitas pemerintah (Maulana, 2020). Dengan demikian e-government dapat berfungsi sebagai instrumen demokrasi lokal yang kuat dalam mendorong partispasi aktif masyarakat dalam pengawas an publik yang berkelanjutan.

Pengalaman konkret di Indonesia menunjukkan bahwa aplikasi Siswaskeudes yang digunakan Inspektorat Kabupaten Buton Tengah untuk mengaw asi penggunaan dana desa mampu meningkatkan transparansi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan dana desa tersebut. Studi kasus menemukan bahwa aspek responsivitas aparat pengawas serta kemudahan akses informasi melalui aplikasi tersebut menjadi faktor utama tingginya tingkat kepercayaan pengguna meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi di desa-desa terpencil serta variasi kemampuan liter asi dig ital antar pengguna (Simonofski et al., 2018) . Kasus ini menggambarkan bagaimana sinergi antara inov asi teknologi dengan dukungan sosial-politik lokal dapat menghasilkan mekanisme pengawasan berbasis elektronik yan g efektif.

Peranan media sosial juga sangat penting sebagai kanal komunikasi alternatif untuk menyebarluaskan informasi mengenai layanan e-government sekaligus membangun kesadaran kolektif akan pentingnya partisp asi akt if warga dal am proses pengawasan publik (Cegarra-Navarro et al., 2012).

Penelitian di Indonesia menemukan bahwa kehadiran media sosial sebagai sarana penyebaran informasi tentang program-program pemerintah berbasis elektronik mampu meningkatkan tingkat kepercayaan warga terhadap layanan tersebut apabila disertai dengan transparansi tata kelola pemerintahan yang baik (Lim et al., 2020). Oleh karena itu strategi komunikasi pemerintah harus melibatkan media sosial secara intensif agar pesan-pesan tentang manfaat penggunaan platform digital sampai kepada seluruh lapisan masyarakat terutama generas i muda.

Dalam hal desain kebijakan publik terkait implementas i-e government perlu diperhatikan pula karakteristik demografis wilayah seperti ukuran popul as i kota/kab up aten karena studi lintas negara Portugal menunjukkan bahwa semakin besar ukuran popul as i suatu daerah maka semakin banyak mekanisme part isp at if berbasis elektronik yan g diterapkan oleh pemerintah setempat guna menjaring aspir asi warganya (LeRoux et al., 2020). Hal ini relevan bagi pembuat kebijakan Indonesia agar mempertimbangkan skala demografis ketika merancang program-program pelayanan elektronik supaya sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah.

Selain itu pembangunan kapas it as apar at ur birokratik juga menjadi faktor kunci keberhasilan implementas i-e government karena SDM birokratis harus mampu mengoperasikan sistem elektronik secara profesional sekaligus memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa layanan publik berbasis daring. Kajian sistematis menegaskan perlunya reformul asi kebijakan manajemen sumber daya manusia sektor publik agar selaras dengan tuntutan era digital termasuk peningkatan kompetensi teknis pegawai negeri sipil serta penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi akuntabilitas demi mendukung efektivitas birokras i modern (Moon, 2002).

Pengalaman Nigeria dalam menggunakan alat-alat e-government untuk memantau pelaksanaan proyek infrastruktur umum memberikan gambaran bagaimana faktor-faktor psikologis pengguna seperti harapan kinerja sistem (performance expectancy) maupun kondisi pendukung teknis sangat menentukan niat perilaku mereka menggunakan platform tersebut secara aktif (Kumar, 2003). Temuan ini relevan bagi Indonesia terutama daerah-daerah tertinggal agar fokus pada penyediaan fasilitas pendukung lengkap disertai sosialisai intensif guna mendorong adopsi teknologi oleh masyarakat luas.

Secara konseptual pemberdayaan warga melalui platform elektronik bukan sekadar soal akses fisik terhadap perangkat atau jaringan internet tetapi juga mencakup dimensi emosional yakni rasa percaya diri menggunakan teknologi; dimensi kognitif berupa pemahaman atas hak-hak sipil; dimensi relasional yakni jejaring sosial pendukung; hingga dimensi perilaku berupa tindakan nyata berpartisp asi akt if dalam proses demokratis online (Feeney & Welch, 2012). Pendekatan multidimensional ini membantu merumuskan strategi pemberdayaan warga agar tidak hanya pasif menerima layanan tetapi turut berkontribusi membentuk kebijakan lewat mekanisme feedback elektronik.

Dalam konteks pemberantasan korupsi misalnya perpaduan antara teknologi digital seperti blockchain atau whistleblowing system dengan

keterlibatan aktif masyarakat terbukti mampu mempercepat deteksi penyimpangan sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif akan bahaya korupsi sehingga mendorong terciptanya pemerintahan lebih bersih dan terpercaya (Williams et al., 2013). Hal ini menegaskan potensi besar sinergi antara inov asi teknologi dengan gerakan sosial-partisipatif berbasis komunitas lokal maupun nasional. Namun demikian perlu dicatat bahwa meskipun potensi besar tersebut ada tetap dibutuhkan regul asi adaptif guna menjamin perlindungan data pribadi pengguna sekaligus memastikan independensi lembaga-lembaga pengawas agar tidak terjebak politisasi atau manipul asi kepentingan tertentu sehingga menjaga kredibilitas sistem elektronik sebagai instrumen kontrol sosial (Manoharan & Ingrams, 2018) .

Pengembangan model ideal e-governance partisipatif hendaknya mengintegrasikan berbagai elemen mulai dari kesiapan teknis infrastruktur IT; peningkatan kapasitas SDM aparatur; edukasi literasi digital bagi warga; pembangunan budaya transparansi; hingga pembentukan mekanisme feedback responsif sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat (Mukhtarov et al., 2018a). Model semacam ini akan memungkinkan terciptanya ekosistem tata kelola pemerintahan modern berbasis kolaboratif dimana setiap elemen saling mendukung demi tercapainya tujuan bersama yaitu pelayanan prima sekaligus kontrol efektif atas jalannya pemerintahan.

2. Hak Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Publik

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik merupakan pilar penting dalam pemerintahan demokratis, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini memberikan hak kepada warga untuk mengakses informasi publik, yang menjadi prasyarat utama partisipasi bermakna dalam pengawasan pemerintah. Di tingkat daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, serta pengawasan jalannya pemerintahan (Komito, 2005). Pengawasan publik dapat dilakukan melalui saluran konvensional seperti musyawarah dan audiensi, maupun saluran digital seperti aplikasi pengaduan dan portal partisipasi. Bentuk pengawasan meliputi aspek kebijakan, proses, hasil, dan perilaku aparatur guna mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Keterbukaan informasi dan kemudahan akses menjadi faktor kunci agar masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Dalam konteks ini, e-government berperan sebagai katalisator yang memperkuat akses informasi dan mempermudah penyampaian aspirasi masyarakat (Napitupulu et al., 2019).

Implementasi e-government telah terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menyediakan akses informasi publik yang lebih luas dan interaksi langsung antara pemerintah dan warga. Teknologi digital memungkinkan warga aktif memberikan masukan, aspirasi, serta mengawasi kebijakan secara real-time. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, literasi teknologi masyarakat, serta komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem yang terbuka dan inklusif (Chen et al.,

2019). Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa ukuran dan kapasitas pemerintah daerah memengaruhi keberhasilan mekanisme partisipatif berbasis e-government. Kota-kota besar cenderung lebih mampu mengembangkan inisiatif partisipatif digital dibandingkan kota kecil karena sumber daya yang lebih besar. Hal ini menandakan perlunya perhatian khusus terhadap kemampuan teknis dan sumber daya di daerah agar partisipasi masyarakat dapat merata (Anthopoulos et al., 2007).

Persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah juga memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam e-government. Ketika warga merasa masukan mereka ditanggapi serius oleh pemerintah, mereka cenderung lebih aktif berpartisipasi. Sebaliknya, ketidakpuasan terhadap responsivitas administrasi dapat menurunkan minat partisipasi meskipun akses teknologi tersedia (Lang & Brüesch, 2020). Oleh karena itu, kualitas umpan balik dari pemerintah menjadi faktor penting dalam mendorong keterlibatan warga. E-government tidak hanya memperluas akses informasi tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan publik melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Aplikasi pengaduan masyarakat memungkinkan pelaporan langsung atas ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan sehingga meningkatkan legitimasi kebijakan publik melalui keterlibatan warga (Okeke-Uzodike & Dlamini, 2019). Ini menunjukkan bahwa e-government dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif.

Namun tantangan utama implementasi e-government adalah kesenjangan digital (digital divide) yang menyebabkan tidak semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan digital secara optimal. Rendahnya literasi teknologi juga membatasi partisipasi aktif warga dalam pengawasan berbasis elektronik. Oleh karena itu program edukasi digital sangat penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menggunakan platform e-government (Jager et al., 2019). Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi tolok ukur kemajuan implementasi e-government di daerah. Indeks ini membantu mengidentifikasi daerah-daerah yang perlu perhatian agar pelayanan publik berbasis elektronik berjalan optimal dan mendorong keterlibatan masyarakat secara luas (T. Lee et al., 2018). Sinergi regulasi nasional dengan adaptabilitas lokal menjadi kunci keberhasilan penerapan e-government.

Desain sistem e-government yang inklusif sangat penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif tanpa terkecuali kelompok rentan. Aksesibilitas layanan serta mekanisme umpan balik berkualitas dari pemerintah kepada warga merupakan bentuk penghargaan atas partisipasinya (Álvarez et al., 2010). Kepemimpinan politik lokal juga menentukan keberhasilan program e-participation di tingkat daerah. Studi kasus kota metropolitan seperti Jakarta dan Surabaya menunjukkan integrasi antara keterlibatan sipil dengan infrastruktur digital memperkuat akuntabilitas tata kelola kota secara signifikan. Platform digital dirancang sesuai kebutuhan pengguna serta literasi digital warga sehingga smart governance berbasis e-government berhasil diterapkan (Bronsgeest et al., 2017). Ini menegaskan potensi model tata kelola modern berbasis teknologi.

Meski minat masyarakat tinggi untuk berpartisipasi secara digital,

realisasi partisipasinya masih rendah di beberapa wilayah Indonesia akibat faktor sosial budaya dan politik. Pendekatan holistik diperlukan agar transformasi digital pemerintahan tidak hanya fokus pada teknologi tetapi juga pemberdayaan komunitas lokal melalui edukasi dan reformulasi kebijakan (Evans-Cowley & Conroy, 2005). Dalam konteks pengawasan proyek infrastruktur publik, adopsi e-government meningkatkan keterlibatan warga dalam memantau pelaksanaan proyek sehingga potensi korupsi dapat diminimalisir. Faktor ekspektasi kinerja sistem serta dukungan sosial turut menentukan niat perilaku warga menggunakan platform tersebut secara aktif 6. Ini menegaskan peran strategis e-government sebagai alat kontrol sosial sekaligus pemberdayaan komunitas.

Penelitian empiris di desa-desa Indonesia menunjukkan bahwa implementasi e-government bersama dengan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan desa. Penerapan prinsip Good Government Governance (GGG) memperkuat efek positif tersebut terutama pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik desa (Norris & Moon, 2005). Ini memberikan bukti konkret manfaat sinergi antara teknologi dan partisipasi. Kepercayaan publik terhadap layanan e-government sangat menentukan efektivitas pengawasan berbasis digital seperti pada penggunaan aplikasi Siswaskeudes untuk pengawasan dana desa di Buton Tengah. Transparansi, aksesibilitas, dan responsivitas sistem menjadi faktor utama membangun kepercayaan tersebut meskipun tantangan infrastruktur teknologi masih ada (Ju et al., 2019). Kepercayaan ini penting untuk mendorong partisipasi aktif warga.

Keterlibatan sipil (civic engagement) bersama dengan implementasi e-government terbukti meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola kota metropolitan melalui perluasan akses informasi serta komunikasi cepat antar pemangku kepentingan. Keberhasilan bergantung pada desain sistem inklusif, literasi digital publik, serta komitmen pemerintah terhadap keterbukaan (Tommasel et al., 2020). Model ini relevan bagi upaya peningkatan governance di daerah lain. Dimensi pemberdayaan digital warga (digital citizen empowerment) meliputi aspek emosional, kognitif, relasional, dan perilaku yang semuanya berkontribusi pada kualitas partisipasi dalam e-government. Persepsi terhadap mekanisme akuntabilitas pemerintah sangat memengaruhi motivasi warga untuk berpartisipasi secara online sehingga perlu perhatian khusus dari pembuat kebijakan (McNutt, 2014). Hal ini menegaskan pentingnya membangun kepercayaan melalui responsivitas administrasi.

3. Analisis Korelasi Implementasi E-Government dan Partisipasi Pengawasan di Daerah

a. Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Korelasi

Korelasi antara implementasi e-government dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik di daerah tidak bersifat langsung dan sederhana, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah variabel antara yang kompleks. Salah satu variabel utama adalah tingkat literasi digital masyarakat. Daerah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi dan akses pendidikan yang merata cenderung menunjukkan korelasi positif

yang lebih kuat karena masyarakat memiliki kemampuan menggunakan aplikasi dan platform digital untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan publik. Sebaliknya, di daerah dengan literasi digital rendah, keberadaan teknologi canggih tidak serta merta meningkatkan partisipasi masyarakat (Mahendra et al., 2020). Variabel kedua adalah kualitas keterbukaan informasi publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. E-government yang hanya menyediakan informasi secara satu arah tanpa mekanisme umpan balik yang responsif cenderung gagal mendorong partisipasi bermakna. Daerah yang mengimplementasikan prinsip keterbukaan data (open data) dan menyediakan akses data yang dapat diunduh serta dianalisis oleh publik menunjukkan tingkat partisipasi pengawasan yang lebih tinggi karena warga merasa diberdayakan untuk mengawasi secara mandiri (Ditarani & Wibisono, 2020).

Responsivitas pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat merupakan variabel ketiga yang sangat menentukan. Studi empiris menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat meningkat signifikan ketika laporan atau pengaduan melalui aplikasi e-government ditanggapi cepat dan ada solusi nyata. Sebaliknya, jika aplikasi pengaduan hanya menjadi "kotak sampah" tanpa tindak lanjut, kepercayaan dan minat partisipasi warga menurun drastis, sehingga potensi e-government sebagai alat pengawasan menjadi terbatas (Dimas & Fahlevvi, 2024). Variabel keempat adalah aksesibilitas teknologi dan inklusivitas sosial. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses setara terhadap perangkat digital dan internet, terutama di daerah dengan kesenjangan digital tinggi antara perkotaan-pedesaan, kaya-miskin, atau generasi muda-lansia. Kondisi ini menyebabkan partisipasi pengawasan berbasis e-government didominasi oleh kelompok tertentu saja sehingga menciptakan ketimpangan representasi suara masyarakat dalam proses pengawasan publik (Dewi et al., 2025).

Budaya politik lokal dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah menjadi variabel kelima yang memengaruhi korelasi tersebut. Di daerah dengan tradisi partisipasi politik kuat dan kepercayaan tinggi terhadap pemerintah, implementasi e-government dapat memperkuat partisipasi yang sudah ada. Namun di daerah dengan apatisme politik tinggi dan skeptisisme terhadap pemerintah, teknologi e-government mungkin tidak banyak berpengaruh karena warga enggan berinteraksi atau percaya pada sistem tersebut (Guntur et al., 2025). Penelitian empiris di beberapa kota besar Indonesia menunjukkan bahwa daerah dengan indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) tinggi juga memiliki tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik lebih baik dibandingkan daerah dengan indeks rendah. Hal ini menegaskan pentingnya kesiapan teknis infrastruktur serta komitmen pemerintah daerah dalam mengelola sistem e-government secara efektif agar dapat mendorong keterlibatan warga secara luas (Hadi, 2018).

Namun demikian, kesenjangan digital masih menjadi hambatan utama bagi pemerataan partisipasi masyarakat dalam pengawasan berbasis elektronik. Kelompok rentan seperti lansia, penduduk pedesaan

terpencil, atau warga kurang mampu seringkali terpinggirkan dari akses layanan digital sehingga perlu adanya program edukasi literasi digital serta penyediaan infrastruktur teknologi yang merata agar inklusivitas dapat tercapai (Oludu et al., 2025). Selain itu, kualitas interaksi dua arah antara pemerintah dan warga melalui platform e-government sangat menentukan keberhasilan partisipatif pengawasan publik. Sistem umpan balik yang responsif tidak hanya meningkatkan kepercayaan tetapi juga memberikan rasa dihargai kepada warga sehingga mereka termotivasi untuk terus aktif memberikan masukan maupun melaporkan pelanggaran atau ketidaksesuaian kebijakan (Arvianti et al., 2025).

Budaya politik lokal juga memengaruhi bagaimana masyarakat memandang peran mereka dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Di wilayah dengan tradisi demokratis kuat, warga lebih terbuka untuk menggunakan media digital sebagai sarana kontrol sosial. Sebaliknya, di wilayah dengan budaya apatis atau otoriterisme lokal masih kuat, penggunaan e-government untuk pengawasan publik cenderung stagnan meskipun teknologi tersedia (Hutahean et al., 2023). Studi kasus di beberapa kota metropolitan Indonesia memperlihatkan bahwa integrasi antara infrastruktur digital berkualitas dengan pemberdayaan komunitas melalui pelatihan literasi digital mampu meningkatkan efektivitas partisipatif pengawasan publik berbasis e-government secara signifikan. Kota-kota seperti Jakarta dan Surabaya berhasil menerapkan model smart governance dengan melibatkan warga secara aktif melalui aplikasi layanan publik interaktif.

Namun realisasi partisipatif tersebut masih menghadapi tantangan berupa disparitas sosial ekonomi dan geografis antar wilayah di Indonesia. Oleh karena itu pendekatan holistik diperlukan agar transformasi digital pemerintahan tidak hanya fokus pada aspek teknologi tetapi juga aspek sosial budaya agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat secara bermakna dalam proses pengawasan. Dalam konteks pencegahan korupsi misalnya, adopsi aplikasi pengaduan berbasis e-government telah terbukti meningkatkan keterlibatan warga dalam memantau proyek-proyek pembangunan sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir secara efektif jika didukung oleh responsivitas aparat pemerintah terhadap laporan tersebut (Kempeneer & Wolswinkel, 2023). Ini menegaskan peran strategis e-government sebagai alat kontrol sosial sekaligus pemberdayaan komunitas.

Kepercayaan publik terhadap sistem e-government sangat menentukan keberlanjutan partisipatif pengawasan berbasis elektronik. Transparansi proses pelayanan serta kemudahan akses menjadi faktor utama membangun kepercayaan tersebut meskipun tantangan infrastruktur masih ada terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang (Heeks, 2001). Kepercayaan ini harus dibangun melalui konsistensi pelayanan responsif. Pemberdayaan digital warga (digital citizen empowerment) meliputi aspek emosional, kognitif, relasional, dan perilaku yang semuanya berkontribusi pada kualitas partisipatif dalam e-government. Persepsi terhadap akuntabilitas pemerintah sangat

memengaruhi motivasi warga untuk berpartisipasi secara online sehingga perlu perhatian khusus dari pembuat kebijakan agar sistem dirancang inklusif dan responsif kebutuhan pengguna (Heeks, 2006).

Strategi pembangunan kapasitas bagi aparat pemerintahan maupun masyarakat sangat diperlukan agar manfaat penuh dari implementasi e-government dapat dirasakan merata terutama di tingkat desa atau kabupaten/kota kecil. Pelatihan penggunaan aplikasi layanan publik terbukti efektif meningkatkan pengetahuan aparat desa sehingga mampu mengakomodir aspirasi warga melalui platform digital. Langkah ini mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka. Kebijakan adaptif yang mendukung inovasi teknologi sekaligus menjembatani kesenjangan sosial budaya harus dijalankan bersamaan agar tidak ada kelompok masyarakat tertinggal dari proses transformasi digital pemerintahan. Pendekatan multidimensi meliputi aspek politik/legal hingga ekonomi/infrastruktur harus dijalankan bersamaan untuk menciptakan ekosistem e-participation sehat berkelanjutan (Lee-Geiller, 2024).

b. Tipologi Daerah Berdasarkan Pola Korelasi

Korelasi antara implementasi e-government dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik di daerah dapat diklasifikasikan ke dalam empat tipologi berdasarkan tingkat kematangan e-government dan partisipasi masyarakat. Tipologi pertama adalah Daerah Progresif, yang ditandai oleh implementasi e-government yang matang dan partisipasi pengawasan masyarakat yang tinggi. Kota-kota besar dengan IPM tinggi seperti Surabaya dengan aplikasi WargaKu dan Bandung dengan Lapor Bandung merupakan contoh daerah ini, di mana e-government dan partisipasi masyarakat saling menguatkan dalam lingkaran virtuos yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Tipologi kedua adalah Daerah Potensial, yaitu daerah dengan implementasi e-government yang sudah matang namun partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah. Faktor penyebabnya meliputi rendahnya literasi digital warga, kurang responsifnya pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, atau aplikasi yang kurang user-friendly sehingga tidak menarik untuk digunakan. Daerah ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi jika hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi melalui edukasi digital dan perbaikan sistem interaksi pemerintah-warga.

Tipologi ketiga adalah Daerah Partisipatif Tradisional, di mana implementasi e-government masih rendah atau belum matang, tetapi tingkat partisipasi pengawasan cukup tinggi melalui saluran konvensional seperti musyawarah desa dan interaksi langsung dengan aparat. Biasanya ini terjadi di daerah pedesaan dengan ikatan komunitas kuat dan tradisi gotong royong yang masih hidup. Penguatan e-government di daerah ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak modal sosial yang sudah ada, melainkan memperkuat mekanisme partisipatif tradisional tersebut. Tipologi keempat adalah Daerah Tertinggal, yaitu daerah dengan implementasi e-government rendah sekaligus tingkat partisipasi pengawasan masyarakat juga rendah. Daerah ini membutuhkan intervensi

simultan berupa pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi teknologi, penguatan kapasitas birokrasi, serta pengembangan kelembagaan partisipatif agar transformasi digital pemerintahan dapat berjalan efektif dan inklusif.

Daerah Progresif menunjukkan bahwa kematangan teknologi e-government mampu mendorong keterlibatan aktif warga dalam pengawasan publik karena adanya akses informasi yang luas, sistem umpan balik responsif, serta birokrasi yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Lingkaran virtuos ini memperkuat akuntabilitas pemerintah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital. Sebaliknya, pada Daerah Potensial, meskipun teknologi sudah tersedia, hambatan non-teknis seperti rendahnya literasi digital dan kurangnya responsivitas pemerintah menjadi faktor utama yang menahan tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan e-government tidak hanya bergantung pada teknologi semata tetapi juga pada aspek sosial dan budaya serta kualitas pelayanan publik.

Di Daerah Partisipatif Tradisional, modal sosial berupa ikatan komunitas kuat menjadi kekuatan utama dalam mendorong partisipasi pengawasan meskipun teknologi belum berkembang pesat. Oleh karena itu, integrasi antara mekanisme tradisional dengan inovasi digital harus dilakukan secara sinergis agar tidak menghilangkan nilai-nilai sosial lokal namun tetap memanfaatkan kemudahan akses informasi dari e-government. Daerah Tertinggal menghadapi tantangan ganda yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi sekaligus minimnya budaya partisipatif dalam pengawasan publik. Intervensi kebijakan harus bersifat komprehensif mulai dari pembangunan jaringan internet hingga pelatihan literasi digital bagi warga dan aparat pemerintahan agar tercipta ekosistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Studi empiris menunjukkan bahwa ukuran kota atau kabupaten berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mengimplementasikan mekanisme partisipatif berbasis e-government. Kota besar cenderung lebih mampu menyediakan platform interaktif untuk warga dibandingkan daerah kecil atau terpencil karena sumber daya manusia dan infrastruktur lebih memadai. Ini mendukung klasifikasi tipologi berdasarkan kematangan teknologi. Responsivitas pemerintah daerah terhadap masukan warga melalui platform digital menjadi faktor kunci dalam meningkatkan motivasi partisipatif masyarakat. Ketika warga melihat aspirasi mereka ditanggapi cepat dan ada tindak lanjut nyata, kepercayaan meningkat sehingga mereka lebih aktif menggunakan aplikasi pengaduan atau portal partisipatif. Sebaliknya respons lambat menurunkan minat berpartisipasi.

Literatur juga menyoroti pentingnya desain sistem e-government yang inklusif agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali terutama kelompok rentan seperti lansia atau penduduk pedesaan terpencil. Aksesibilitas layanan serta kemudahan penggunaan aplikasi menjadi faktor penting untuk memastikan inklusivitas tersebut. Budaya politik lokal turut memengaruhi efektivitas implementasi e-

government dalam mendorong partisipasi pengawasan publik. Di wilayah dengan tradisi demokratis kuat dan kepercayaan tinggi kepada pemerintah, teknologi digital memperkuat mekanisme kontrol sosial yang sudah ada. Sebaliknya di wilayah dengan apatisme politik atau ketidakpercayaan tinggi terhadap pemerintah, dampak positif e-government cenderung terbatas.

Pengalaman kota metropolitan seperti Surabaya menunjukkan bahwa integrasi antara infrastruktur digital berkualitas dengan pemberdayaan komunitas melalui pelatihan literasi digital mampu meningkatkan efektivitas tata kelola berbasis smart governance secara signifikan. Model ini dapat dijadikan rujukan bagi daerah lain untuk mengembangkan tipologi Progresif. Namun disparitas sosial ekonomi antar wilayah masih menjadi kendala utama bagi pemerataan manfaat e-government dalam mendorong partisipatif pengawasan publik. Oleh karena itu pendekatan holistik diperlukan agar transformasi digital tidak hanya fokus pada aspek teknologi tetapi juga aspek sosial budaya agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat bermakna.

Dalam konteks pencegahan korupsi misalnya, adopsi aplikasi pengaduan berbasis elektronik telah terbukti meningkatkan keterlibatan warga dalam memantau proyek pembangunan sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir jika didukung oleh responsivitas aparat pemerintah terhadap laporan tersebut. Ini menegaskan peran strategis e-government sebagai alat kontrol sosial sekaligus pemberdayaan komunitas. Kepercayaan publik terhadap sistem e-government sangat menentukan keberlanjutan partisipatif pengawasan berbasis elektronik. Transparansi proses pelayanan serta kemudahan akses menjadi faktor utama membangun kepercayaan tersebut meskipun tantangan infrastruktur masih ada terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang. Kepercayaan harus dibangun melalui konsistensi pelayanan responsif.

Pemberdayaan digital warga (digital citizen empowerment) meliputi aspek emosional, kognitif, relasional, dan perilaku yang semuanya berkontribusi pada kualitas pengalaman partisipatif dalam e-government. Persepsi terhadap akuntabilitas pemerintah sangat memengaruhi motivasi warga untuk berpartisipasi secara online sehingga perlu perhatian khusus dari pembuat kebijakan agar sistem dirancang inklusif dan responsif kebutuhan pengguna. Strategi pembangunan kapasitas bagi aparat pemerintahan maupun masyarakat sangat diperlukan agar manfaat penuh dari implementasi e-government dapat dirasakan merata terutama di tingkat desa atau kabupaten/kota kecil. Pelatihan penggunaan aplikasi layanan publik terbukti efektif meningkatkan pengetahuan aparat desa sehingga mampu mengakomodir aspirasi warga melalui platform digital. Kebijakan adaptif yang mendukung inovasi teknologi sekaligus menjembatani kesenjangan sosial budaya harus dijalankan bersamaan agar tidak ada kelompok masyarakat tertinggal dari proses transformasi digital pemerintahan. Pendekatan multidimensi meliputi aspek politik/legal hingga ekonomi/infrastruktur harus dijalankan bersamaan untuk menciptakan ekosistem e-participation sehat berkelanjutan..

Kesimpulan

Korelasi antara implementasi e-government dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik di daerah tidaklah linear dan otomatis. Keberadaan infrastruktur digital dan aplikasi canggih tidak dengan sendirinya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Korelasi positif yang kuat hanya akan terwujud jika diiringi oleh peningkatan literasi digital masyarakat, komitmen terhadap keterbukaan informasi publik yang substantif, responsivitas aparatur terhadap aspirasi yang masuk, aksesibilitas teknologi yang inklusif, serta penguatan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Tipologi daerah yang beragam menuntut pendekatan yang kontekstual. Daerah progresif perlu terus berinovasi, daerah potensial perlu fokus pada penguatan faktor penghambat, daerah partisipatif tradisional perlu mengintegrasikan teknologi tanpa merusak modal sosial, sementara daerah tertinggal membutuhkan intervensi holistik. Model e-government partisipatif ideal harus dibangun di atas prinsip transparansi radikal, responsivitas terukur, inklusivitas digital, serta integrasi dan simplifikasi aplikasi. Pada akhirnya, e-government harus diposisikan tidak sekadar sebagai alat administrasi, melainkan sebagai infrastruktur demokrasi yang memperkuat relasi warga negara dengan pemerintahnya dan mewujudkan akuntabilitas publik yang sesungguhnya.

Referensi

Abdulraheem, M., Osman, W., & Nadzir, M. M. (2018). The Citizens' Intention to Participate in E-Government Public Decision: Pilot Study. *Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology*, *15*, 124–131. https://doi.org/10.19026/rjaset.15.5837

Allen, B., Tamindael, L., Bickerton, S., & Cho, W. (2020). Does citizen coproduction lead to better urban services in smart cities projects? An empirical study on e-participation in a mobile big data platform. *Gov. Inf. Q.*, *37*. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101412

Álvarez, I. G., Domínguez, L. R., & Sanchez, I. (2010). Are determining factors of municipal E-government common to a worldwide municipal view? An intra-country comparison. *Gov. Inf. Q.*, *27*, 423–430. https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.12.011

Anthopoulos, L., Siozos, P., & Tsoukalas, I. (2007). Applying participatory design and collaboration in digital public services for discovering and re-designing e-Government services. *Gov. Inf. Q.*, *24*, 353–376. https://doi.org/10.1016/j.giq.2006.07.018

Arvianti, S., Radjikan, & Basyar, M. R. (2025). PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS ONLINE DI OMBUDSMAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *5*(1), 137–155. https://doi.org/https://doi.org/10.69957/praob.v5i01.2152

Ashaye, O. R., & Irani, Z. (2019). The role of stakeholders in the effective use of e-government resources in public services. *Int. J. Inf. Manag.*, *49*, 253–270. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.05.016

Braga, L. V., & Gomes, R. (2016). *Participação eletrônica e suas relações com governo eletrônico, efetividade governamental e accountability*. *23*, 487–506. https://doi.org/10.1590/1984-92307878

Bronsgeest, W., Arendsen, R., & Dijk, J. (2017). *Towards Participatory E-Government?: Learning from E-Government Project Evaluations*. 127–139. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64322-9_11

Budi, N., Fitriani, W., Hidayanto, A., Kurnia, S., & Inan, D. (2020). A study of government 2.0 implementation in Indonesia. *Socio-Economic Planning Sciences*, *72*, 100920. https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100920

Cegarra-Navarro, J., Córdoba-Pachón, J., & Moreno-Cegarra, J.-L. (2012). E-government and citizen's engagement with local affairs through e-websites: The case of Spanish municipalities. *Int. J. Inf. Manag.*, *32*, 469–478. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2012.02.008

Chen, Y.-C., Hu, L.-T., Tseng, K.-C., Juang, W.-J., & Chang, C.-K. (2019). Cross-boundary e-government systems: Determinants of performance. *Gov. Inf. Q.*, *36*, 449–459. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.02.001

Choi, J.-C., & Song, C. (2020). Factors explaining why some citizens engage in E-participation, while others do not. *Gov. Inf. Q.*, *37*, 101524. https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101524

Defitri, S. Y., Bahari, A., Handra, H., & Febrianto, R. (2020). DETERMINANT FACTORS OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION AND PUBLIC ACCOUNTABILITY: TOE FRAMEWORK APPROACH. *Public Policy and Administration*, *19*, 37–51. https://doi.org/10.13165/vpa-20-19-4-03

Dewi, E. K., Muhaemin, Y., Sitompul, G. A., Parinduri, R. Y., & Rika, M. (2025). Digital Transformation in Public Services: Evaluation of E-Government Implementation in Indonesia . *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* , *3*(4), 1–8. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17475222

Dias, G. (2020). Determinants of e-government implementation at the local level: an empirical model. *Online Inf. Rev.*, *44*, 1307–1326. https://doi.org/10.1108/oir-04-2020-0148

Dimas, M., & Fahlevvi, M. R. (2024). Pengentasan Digital Divide dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Sumbawa . *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* , *6*(2), 194–215. https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i2.4504

Ditarani, F., & Wibisono, B. (2020). *Dampak Peningkatan Kualitas Fisik Terhadap Perkembangan Aktivitas Sosial-Ekonomi di Pedestrian Sudirman Palembang*. *4*, 55–64. https://doi.org/10.29408/geodika.v4i1.1981

Drobiazgiewicz, J. (2018). *The role of e-participation – citizen engagement in public service delivery*. *26*, 53–60. https://doi.org/10.18276/ejsm.2018.26-07

Evans-Cowley, J., & Conroy, M. (2005). *E-government and Planning: Key Citizen Participation Issues and Applications*. https://consensus.app/papers/egovernment-and-planning-key-citizen-participation-evans-cowley-conroy/7ee2ab38fba158d58d269a7a5a281caa/

Feeney, M., & Welch, E. (2012). Electronic Participation Technologies and Perceived Outcomes for Local Government Managers. *Public Management Review*, *14*, 815–833. https://doi.org/10.1080/14719037.2011.642628

Guntur, W. N., Tuan, Y., & Asnawi, N. (2025). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT BAGI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI . *Petitum Law Journal*, *2*(2), 483–504.

Hadi, A. (2018). Bridging Indonesia's Digital Divide: Rural-Urban Linkages? *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *22*(1), 17–33. https://doi.org/10.22146/jsp.31835

Heeks, R. (2001). *Understanding e-Governance for Development* (11; I-Government Working Paper Series).

Heeks, R. (2006). *Implementing and Managing E-Government*. Sage Publications.

Hutahean, M., Eunike, I. J., & Silalahi, A. D. K. (2023). Do Social Media, Good Governance, and Public Trust Increase Citizens' e-Government Participation? Dual Approach of PLS-SEM and fsQCA. *Human Behavior and Emerging Technologies*, (1), 998–8602. https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2023/9988602

Jager, N., Newig, J., Challies, E., & Kochskämper, E. (2019). Pathways to Implementation: Evidence on How Participation in Environmental Governance Impacts on Environmental Outcomes. *Journal of Public Administration Research and Theory*. https://doi.org/10.1093/jopart/muz034

Ju, J., Liu, L., & Feng, Y. (2019). Public and private value in citizen participation in E-governance: Evidence from a government-sponsored green commuting platform. *Gov. Inf. Q.*, *36*. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101400

Kempeneer, S., & Wolswinkel, J. (2023). Rethinking Open Government Data for Citizen Participation. An Introduction to a Special Issue. *Sage Journals*, *28*(2), 163–173. https://doi.org/https://doi.org/10.3233/IP-239008

Kim, S., & Lee, J. (2012). E-Participation, Transparency, and Trust in Local Government. *Public Administration Review*, *72*, 819–828. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02593.x

Kim, S., & Lee, J. (2019). Citizen Participation, Process, and Transparency in Local Government: An Exploratory Study. *Policy Studies Journal*, *47*, 1026–1047. https://doi.org/10.1111/psj.12236

Komito, L. (2005). E-participation and Governance: Widening the net. *Electronic Journal of E-Government*, *3*, 39–48. https://consensus.app/papers/eparticipation-and-governance-widening-the-net-komito/02449fb651b259e787cd62529fc8d7bf/

Krishnan, S., Teo, T., & Lymm, J. (2017). Determinants of electronic participation and electronic government maturity: Insights from cross-country data. *Int. J. Inf. Manag.*, *37*, 297–312. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.03.002

Kumar, A. (2003). E-Government and Efficiency, Accountability and Transparency. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, *12*. https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2003.tb00077.x

Lang, A., & Brüesch, C. (2020). Collaborative Governance in Program Implementation: The Development of E-Relocation Notification in the Swiss Canton of Zurich. *International Journal of Public Administration*, *43*, 1083–1095. https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1665681

Lee, J., & Kim, S. (2018). Citizens' e-participation on agenda setting in local governance: Do individual social capital and e-participation management matter? *Public Management Review*, *20*, 873–895. https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1340507

Lee, T., Park, H., & Lee, J. (2018). Collaborative accountability for sustainable public health: A Korean perspective on the effective use of ICT-based health risk communication. *Government Information Quarterly*, *36*, 226–236. https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.12.008

Lee-Geiller, S. (2024). The moderating effect of digital literacy on the link between e-government effectiveness and trust in government. *J. Policy Stud*, *39*(4), 77–101. https://doi.org/https://doi.org/10.52372/jps.e672

LeRoux, K., Fusi, F., & Brown, A. (2020). Assessing e-government capacity to increase voter participation: Evidence from the U.S. *Gov. Inf. Q.*, *37*, 101483. https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101483

Lim, S. B., Malek, J. A., Hussain, M., & Tahir, Z. (2020). PARTICIPATION IN E-GOVERNMENT SERVICES AND SMART CITY PROGRAMS: A CASE STUDY OF MALAYSIAN LOCAL AUTHORITY. *PLANNING MALAYSIA JOURNAL*, *18*. https://doi.org/10.21837/pm.v18i13.794

Mahendra, R., Salamah, I., & Nasron, N. (2020). KOTAK SAMPAH OTOMATIS BERBASIS ARDUINO MEGA 2560. *Jurnal Qua Teknika*. https://doi.org/10.35457/quateknika.v10i2.1193

Manoharan, A., & Ingrams, A. (2018). Conceptualizing E-Government from Local Government Perspectives. *State and Local Government Review*, *50*, 56–66. https://doi.org/10.1177/0160323x18763964

Maulana, R. Y. (2020). Collaborative Governance in the Implementation of E-Government-Based Public Services Inclusion in Jambi Province, Indonesia. *Journal of Governance*. https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7317

McNutt, K. (2014). Public engagement in the Web 2.0 era: Social collaborative technologies in a public sector context. *Canadian Public Administration-Administration Publique Du Canada*, *57*, 49–70. https://doi.org/10.1111/capa.12058

Moon, M. (2002). The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric or Reality? *Public Administration Review*, *62*, 424–433. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00196

Moreno-Enguix, M., Lorente-Bayona, L. V., & Gras-Gil, E. (2019). Can E-Government Serve as a Tool for Public Authorities to Manage Public Resources More Efficiently? *J. Glob. Inf. Manag.*, *27*, 122–135. https://doi.org/10.4018/jgim.2019040107

Mukherjee, S. (2019). How IT allows E-Participation in Policy-Making Process. *Environment for Innovation EJournal*. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7796063.v2

Mukhtarov, F., Mukhtarov, F., Dieperink, C., & Driessen, P. (2018). The influence of information and communication technologies on public participation in urban water governance: A review of place-based research. *Environmental Science & Policy*. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.08.015

Napitupulu, D., Adiyarta, K., & Albar. (2019). Public Participation Readiness Toward E-Gov 2.0: Lessons from Two Countries. *Proceedings of the 12th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance*. https://doi.org/10.1145/3326365.3326397

Naranjo-Zolotov, M., Oliveira, T., Casteleyn, S., & Irani, Z. (2019). Continuous usage of e-participation: The role of the sense of virtual community. *Gov. Inf. Q.*, *36*, 536–545. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.05.009

Norris, D., & Moon, J.-T. (2005). Advancing E-Government at the Grassroots: Tortoise or Hare? *Public Administration Review*, *65*, 64–75. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00431.x

Nulhusna, R., Sandhyaduhita, P., Hidayanto, A., & Phusavat, K. (2017). The relation of e-government quality on public trust and its impact on public participation. *Transforming Government: People, Process and Policy*, *11*, 393–418. https://doi.org/10.1108/tg-01-2017-0004

Okeke-Uzodike, O., & Dlamini, B. (2019). Citizens' E-Participation at Local Municipal Government in South Africa. *Journal of Reviews on Global Economics*. https://doi.org/10.6000/1929-7092.2019.08.39

Oludu, O. V., Kaya, T., & Karagozlu, D. (2025). Citizens' preference for e-participatory governance. *PLoS One*, *20*(2), 30–6268. https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306268

Salamat, M. A., Hassan, S., & Muhammad, M. S. (2011). *Electronic Participation in Malaysia*. 1–11. https://doi.org/10.5171/2011.270543

Sandoval-Almazán, R., & Gil-Garcia, R. (2011). Are government internet portals evolving towards more interaction, participation, and collaboration? Revisiting the rhetoric of e-government among municipalities. *Gov. Inf. Q.*, *29*. https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.09.004

Santamaría-Philco, A., Canós-Cerdá, J. H., & Gramage, M. C. P. (2019). Advances in e-Participation: A perspective of Last Years. *IEEE Access*, *7*, 155894–155916. https://doi.org/10.1109/access.2019.2948810

Scott, J. (2006). "E" the People: Do U.S. Municipal Government Web Sites Support Public Involvement? *Public Administration Review*, *66*, 341–353. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00593.x

Sharma, S. (2004). Assessing e-government implementations. *Electron. Gov. an Int. J.*, *1*, 198–212. https://doi.org/10.1504/eg.2004.005178

Shkarlet, S., Oliychenko, I., Dubyna, M., Ditkovska, M., & Zhovtok, V. (2020). Comparative analysis of best practices in e-Government implementation and use of this experience by developing countries. *Administratie Si Management Public*. https://doi.org/10.24818/amp/2020.34-07

Simonofski, A., Vanderose, B., Clarinval, A., & Snoeck, M. (2018). The Impact of User Participation Methods on E-Government Projects: The Case of La Louvière, Belgium. *Media and Communication*. https://doi.org/10.17645/mac.v6i4.1657

Steinbach, M., Sieweke, J., & Süß, S. (2019). The diffusion of e-participation in public administrations: A systematic literature review. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, *29*, 61–95. https://doi.org/10.1080/10919392.2019.1552749

Sun, P.-L., Ku, C., & Shih, D.-H. (2015). An implementation framework for E-Government 2.0. *Telematics Informatics*, *32*, 504–520. https://doi.org/10.1016/j.tele.2014.12.003

Tommasel, A., Godoy, D., & Pace, J. (2020). *Hacia una e-Participación efectiva: Un análisis de la interacción y compromiso de los ciudadanos digitales en Argentina*. *19*, 208–232. https://consensus.app/papers/hacia-una-eparticipaci%C3%B3n-efectiva-un-an%C3%A1lisis-de-la-tommasel-godoy/c63328c964a55f3db690fb4b5fd0b6fe/

Tursunbayeva, A., Franco, M., & Pagliari, C. (2017). Use of social media for e-Government in the public health sector: A systematic review of published studies. *Gov. Inf. Q.*, *34*, 270–282. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.04.001

Utama, A. A. G. S. (2020). The implementation of e-government in indonesia. *International Journal of Research In Business and Social Science*, *9*, 190–196. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.929

Vakeel, K., & Panigrahi, P. (2017). Social Media Usage in E-Government: Mediating Role of Government Participation. *J. Glob. Inf. Manag.*, *26*, 1–19. https://doi.org/10.4018/jgim.2018010101

Wang, L., Luo, X., & Jurkat, P. (2020). Understanding Inconsistent Corruption Control through E-government Participation: Updated Evidence from a Cross-Country Investigation. *Electronic Commerce Research*, *22*, 979–1006. https://doi.org/10.1007/s10660-020-09444-x

Williams, C., Gulati, G., & Yates, D. (2013). Predictors of on-line services and e-participation: a cross-national comparison. *Proceedings of the 14th Annual International Conference on Digital Government Research*. https://doi.org/10.1145/2479724.2479752

Wilson, C. (2020). The socialization of civic participation norms in government?: Assessing the effect of the Open Government Partnership on countries' e-participation. *Gov. Inf. Q.*, *37*, 101476. https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101476